

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Posisi geografis Indonesia menempatkan Indonesia sebagai negara yang rawan akan bencana alam. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana alam sebagai peristiwa yang terjadi yang disebabkan oleh alam (Sutrisnawati, 2018). Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan setidaknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya bencana alam di Indonesia. Pertama, kondisi geografis Indonesia berada di wilayah ring of fire, yang merupakan jalur rangkaian gunung api paling aktif di dunia. Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang dikelilingi oleh cincin api pasifik sepanjang 40.000 km, yang membuat Indonesia rentan terhadap ancaman gempa bumi (Sri Wahananing Dyah, 2020).

Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan sedang hingga tinggi terhadap bencana gempa bumi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah NTB adalah gempa bumi dengan kekuatan 6,9 SR pada Agustus 2018. Gempa bumi ini berpusat di Kabupaten Lombok Utara sehingga wilayah ini terkena dampak paling serius. Hingga akhir Agustus 2018 BNPB mencatat telah terjadi 1.005 gempa susulan yang berakibat kerusakan parah pada kehidupan, harta benda, bahkan sebanyak 537 jiwa meninggal dunia (Heru Kusuma Bakti, 2020). Berbagai infrastruktur, sector social, ekonomi, lintas sector seperti kantor pemerintahan, lingkungan hidup, perbankan tidak terhindar dari kerusakan. Nilai keseluruhan kerusakan dan

kerugian di Lombok Utara untuk seluruh sector dan subsektor mencapai hampir Rp. 10 Triliun.

Tabel 1.1 Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Gempa Lombok Utara Tahun 2018

No	Sektor	Nilai Kerusakan (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)	Total Kerusakan dan Kerugian (Rp)
1	Permukiman	3,505,485,200,000	3.731.409.800.000	7.236.895.000.000
2	Infrastruktur	303.676.794.062	15.943.406.000	319.620.200.062
3	Sosial	1.160.633.995.036	169.893.013.566	1.330.527.008.602
4	Ekonomi	274,310,973,893	428,718,820,000	703,029,839
5	Lintas Sektor	235,104,235,250	166,009,017,698	401,113,252,948
	Total	5,479,211,198,187	4,511,974,057,264	9,991,185,255,451

Sumber : Dokumen Rencana Aksi Rehab Rekon Pasca Gempa Lombok Utara 2018

Nilai estimasi kerugian yang tinggi disebabkan oleh jumlah kerusakan yang besar pada hunian. Kerusakan hunian terkonsentrasi di Kecamatan Tanjung, terdapat 11.532 bangunan rusak berat, 2.174 bangunan rusak sedang dan sebanyak 725 bangunan rusak ringan (BPBD, 2018). Salah satu lokasi yang mengalami kerusakan berat akibat bencana adalah Dusun Orong Nagasari. Besarnya kerusakan di Dusun Orong Nagasari diakibatkan oleh bangunan yang didesain dan dibangun tidak memperhatikan kaidah-kaidah bangunan tahan gempa, sehingga lebih dari 90 persen hunian mengalami kerusakan struktural berat bahkan terdapat bangunan yang runtuh akibat gempa yang terjadi.

Hal ini sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan oleh Tim Pusat Studi Gempa Nasional yang menemukan bahwa kerusakan berat yang

terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor dalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Terkait fakta tersebut, dalam upaya pemulihan hunian harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan agar dapat meminimalkan risiko kerugian jika terjadi gempa bumi. Peneliti seperti (Boano, 2009) dan (Ozcevik, Turk, Tas, & Yaman, 2009) mengusulkan agar tahap pemulihan digunakan tidak hanya untuk memulihkan masyarakat ke keadaan sebelum bencana, tetapi mengambil kesempatan untuk menciptakan kondisi lebih aman, lebih berkelanjutan dan menciptakan komunitas yang tangguh.

Pendekatan seperti itu yang disusun oleh BPBD Lombok Utara, SPKD terkait, serta pemangku kepentingan lainnya yang difasilitasi BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam dokumen rencana pemulihan berupa aksi rehabilitasi dan rekonstruksi hunian. Ini merupakan bentuk respons pemerintah dikarenakan setiap negara memiliki tanggung jawab pertama dan utama untuk melakukan pemulihan pasca bencana. Sesuai dengan kebijakan nasional di bidang tata kelola bencana melalui Undang-undang No. 24 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa penyelenggara utama pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana adalah pemerintah.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 menjadi bagian perlindungan dari hak dasar rakyat dan menunjuk pemerintah sebagai pengemban tugas dalam tata kelola dan pemulihan pasca bencana. Ketika bencana berdampak pada suatu daerah, merusak perumahan, infrastruktur, sosial ekonomi, maka pemerintah kemudian harus memainkan peran utama dalam organisasi, koordinasi, dan pelaksanaan pemulihan pasca bencana.

Namun dalam beberapa kasus, Pemerintah memiliki kelemahan dalam mengambil setiap tindakan pemulihan pasca bencana. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir, pemulihan pasca bencana telah diadopsi menggunakan metode tata kelola kolaboratif. Reilly dalam Anshell & Gash menjelaskan upaya kolaboratif sebagai jenis pemecahan masalah yang melibatkan instansi pemerintah, organisasi non pemerintah, LSM dan warga yang peduli (Ansell & Gash, 2007). Para peneliti sebelumnya di bidang pemulihan pasca bencana menyadari perlunya kolaborasi berbagai pihak. Organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, entitas pasar, dan organisasi sosial memiliki tanggung jawab di berbagai fase pascabencana termasuk tahap pemulihan (Sulzakimin, Adejoh, & Y, 2019).

Begitupun yang terjadi dalam pemulihan hunian pasca bencana di Orong Nagasari dilakukan dengan pendekatan tata kelola kolaboratif. Organisasi yang turut serta dalam membantu membangun hunian di Orong Nagasari yakni Arkom dan menjadi satu-satunya yang terlibat dalam membangun hunian tetap di Orong Nagasari. Pembangunan ini dibagi menjadi dua yakni pembangunan hunian tetap RTG dan fasilitas pelengkap RTG seperti dapur, kamar tambahan dan kamar mandi/wc/sanitasi.

Keterlibatan Arkom dikarenakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dimana salah satu fokus utamanya adalah dalam manajemen bencana. Keterlibatan Arkom membantu pemerintah menjangkau dan menyelesaikan permasalahan yang ada karena lembaga ini memiliki kemampuan merespons lebih cepat daripada yang bisa dilakukan pemerintah. Seringkali lembaga non

pemerintah mampu menjangkau dengan jangkauan yang lebih luas dengan dampak yang berkelanjutan (Chu, 2001).

Stakeholders lainnya yang memiliki kontribusi dalam upaya pemulihan di Orong Nagasari yakni Bappeda Lombok Utara, BPBD, PUPR, Kepala Desa Sokong, Kepala Dusun Orong Nagasari, Masyarakat dan Yayasan Arkom. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Arkom atas persetujuan dan kerjasama dengan Pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang terkena dampak. Salah satu alasan Arkom memilih Orong Nagasari karena masyarakat di Orong Nagasari memiliki potensi sosial dimana terdapat kelompok masyarakat yang aktif sehingga menjadi modal sosial yang mempermudah dalam pemulihan hunian. Dengan ini Orong Nagasari menjadi *Pilot Project* atau percontohan dalam pemulihan hunian di Kecamatan Tanjung berbasis tata kelola kolaboratif.

Berdasarkan uraian di atas, secara khusus penulisan ini akan membahas mengenai “Pendekatan Tata Kelola Kolaboratif dalam Pemulihan Hunian Pasca Bencana Gempa Bumi di Dusun Orong Nagasari, Lombok Utara”. Untuk membantu memahami *Collaborative Governanve*, penulis menggunakan gagasan teori Emerson, Nabatchi dan Balogh (2011). Oleh karena tulisan (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2011) yang terlengkap sehingga penulis menggunakan sebagai kerangka utama dalam penelitian. Kerangka kerja *Collaboartive Governance* Emerson et al dapat digunakan secara bervariasi termasuk mengukur kolaborasi dalam pemulihan pasca bencana.

Adanya penelitian ini adalah untuk mengatasi kesenjangan penelitian dalam kolaborasi manajemen bencana dalam tahap pemulihan terutama pasca bencana di Kabupaten Lombok Utara. (Altay & Green, 2006) mengidentifikasi kurang dari 10% minat penelitian tentang pengelolaan pemulihan bencana dibandingkan dengan lebih banyak (90%) minat penelitian tentang kesiapsiagaan dan periode respons manajemen risiko bencana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses tata kelola kolaboratif yang berlangsung dalam pemulihan hunian di Orong Nagasari, Desa Sokong, Lombok Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses tata kelola kolaboratif yang berlangsung dalam pemulihan hunian di Orong Nagasari, Desa Sokong, Lombok Utara?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah keilmuan mengenai tata kelola kolaboratif dalam pemulihan hunian pasca bencana dan sebagai referensi atau acuan bagi yang membutuhkan dan terinspirasi dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kontribusi berupa rekomendasi solusi bagi pemerintah daerah dan stakeholders lain berkaitan dengan tata kelola kolaboratif terutama dalam pemulihan hunian agar dapat berjalan dengan efektif.

1.5 Literatur Riview

(Dyah & Prasajo, 2020) meneliti mengenai upaya penanggulangan pasca gempa di wilayah bagian barat jawa menggunakan teori *Collaborative Governance Regime* yang dikemukakan oleh (Emerson, Nabatchi , & Balogh , 2012). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan tata kelola kolaboratif dalam penangan pasca gempa. Hasilnya pada tahap Dinamika Kolaborasi, seperti Keterlibatan, Motivasi bersama dan Kapasitas melakukan tindakan bersama masih belum optimal. Dalam motivasi bersama stakeholders tidak memiliki kepercayaan penuh pada kinerja masing-masing dan adanya keterbatasan sumber daya pada kapasitas kolaborasi (Dyah & Prasajo, 2020).

Penelitian oleh (Trygg, 2018) tentang tata kelola kolaboratif antar lembaga, *Understanding collaboration and local development – a Swedish case study on different actors’ roles and perspectives*. Peneliti menggunakan metode campuran. Hasilnya, faktor kepercayaan sangat penting, kurangnya kepercayaan dan interaksi sosial mempengaruhi proyek pembangunan perumahan (Trygg, 2018). Penelitian selanjutnya oleh Mittul Vahanvati & Martin Mulligan, *A new model for effective post-disaster housing reconstruction: Lessons from Gujarat*

and Bihar in India. Pendekatan menggunakan studi kasus komparatif dan metode campuran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses utama (atau faktor keberhasilan) proyek *Post-disaster reconstruction (PDR)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDR berhasil bila dibangun di atas fondasi kepercayaan yang kuat antar lembaga dan dukungan teknis (Anbanandam, 2011).

Penelitian lain dilakukan oleh Azmeri et al terkait *Disaster Recovery Indicators of Housing Reconstruction: The Story of Post Tsunami Aceh, Indonesia*. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi proses pemulihan perumahan setelah satu dekade. Focus Group Discussion dipilih sebagai teknik pengumpulan data utama untuk mencapai diskusi komprehensif di antara semua pelaku terlibat dalam proses rekonstruksi. Disimpulkan bahwa beberapa indikator yang berperan sebagai hambatan dan dukungan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yakni Partisipasi masyarakat, pengadaan bahan bangunan dan sumber daya tenaga terampil. Kegagalan dalam pemantauan dan pengendalian rekonstruksi perumahan terjadi. Ini terkait dengan berbagai tantangan yang dihadapi saat implementasi terutama jumlah petugas teknis yang sangat sedikit per kabupaten dengan beban kerja yang sangat besar dan pengetahuan teknis yang terbatas (Azmeri, Mutiawati, Al-Huda, & Mufiaty, 2017).

(Hijah & Komarudin, 2019) meneliti mengenai Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Lombok NTB Tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Rehabilitasi dan Rekonstruksi khususnya dibidang perumahan dan permukiman di Nusa Tenggara Barat. Penelitian dilakukan secara kualitatif, dari wawancara dan observasi yang dilakukan, hasilnya, lemahnya partisipasi

masyarakat dalam program pemulihan. Faktor penyebabnya yakni rumitnya pengaturan prosedural yang mencakup berbagai protokol proses pemulihan. (Heru Kusuma Bakti, 2020) mengungkapkan hal yang sama dalam penelitiannya terkait upaya recovery pasca gempa bumi di Lombok. Ditemukan dalam pemulihan perumahan di Lombok Utara, permasalahan dalam pemulihan perumahan terletak pada proses birokrasi yang rumit, bahan bangunan serta sumber daya keterampilan yang langka.

Penelitian (Daly, Barenstein, Hollenbach, & Ninglekhu, 2017) dalam *Post disaster housing reconstruction* di Nepal, melakukan wawancara semi-terstruktur formal dan informal dengan pemerintah dan komunitas local. Hasilnya, the *government of Nepal (GoN)* membentuk lembaga *National Reconstruction Authority (NRA)* untuk menangani pemulihan pasca bencana. Daly et al mengatakan bahwa keberadaan NRA dalam rekonstruksi perumahan terdampak bencana tidak efektif. Kekurangan sumber daya manusia dengan kapasitas yang memadai, dan peraturan baru terlalu ketat terkait Pendanaan menjadi inti tidak efektifnya NRA.

Penelitian lain yang relevan (Sabaruddin & Said, 2015), *Collaborative Governance in Household Handling*. Penelitian menganalisis proses tata kelola kolaboratif dalam penanganan rumah tidak layak huni. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, proses kolaboratif penanganan rumah tidak layak huni di Kecamatan Kolaka dan Kolaka Utara dilakukan melalui mekanisme formal dan informal, termasuk (1) dialog antar actor. Secara formal, dialog tersebut melalui forum bersama untuk

mengedepankan musyawarah (2) membangun consensus, stakeholders yang terlibat memiliki tanggung jawab yang telah diputuskan bersama.

Selanjutnya penelitian Abdulquadri et al mengenai *A Framework for managing post-disaster housing reconstruction*. Penelitian ini merangkum keberhasilan dan contoh praktik yang baik dalam rekonstruksi perumahan pasca bencana. Misalnya dari kasus Jepang, koordinasi yang jelas antara pusat dan daerah merupakan dukungan untuk percepatan upaya pemulihan dan rekonstruksi. Adanya hukum yang mengatur proses rekonstruksi dan struktur organisasi sangat dibutuhkan untuk mengelola interaksi antar stakeholders agar tindakan kolaboratif berjalan efektif (Bilau, Witt, & Lill, 2015).

Penelitian (Sulzakimin, Adejoh, & Ibrahim, 2019), *Stakeholders in Post Disaster Housing Reconstrucyion and Its Benefits*, bertujuan untuk mengetahui keterlibatan stakeholders dalam proyek rehabilitasi perumahan pasca bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah literature riview dilakukan. Kualitas stakeholders memiliki kecenderungan mempengaruhi kinerja proyek pemulihan setelah bencana. Efek yang dihasilkan dari sumber daya manusia merupakan penyelesaian proyek pemulihan tepat waktu dan sesuai budget. Selain itu, adanya komitmen dan partisipasi dari stakeholders perlu ditekankan karena keterlibatan mereka yang memfasilitasi proyek serta menjamin kesuksesan intervensi rekonstruksi. Adanya komitmen, partisipasi, sumber daya (keuangan, manusia) yang sesuai adalah hal yang perlu diperhatikan dan jika ingin mencapai kesuksesan dalam pemulihan.

Banyaknya penelitian terdahulu diatas, sebaiaian besar menyoroiti strategi pemulihan perumahan secara tunggal daripada membangun kolaborasi dengan lintas sector. Meski beberapa peneliti telah mempelajari manajemen kolaboratif dalam pemulihan pasca bencana namun masih adanya *gap* atau kesenjangan dalam ilmu pengetahuan mengenai penelitian tentang tata kekola kolaboratif dalam pemulihan perumahan pasca bencana. Adanya penelitian ini untuk mengisi kekosongan pengetahuan dalam tata kelola kolaboratif dalam pemulihan perumahan pasca bencana.

1.6 Kerangka Konsep

1.6.1 Manajemen Bencana

Manajemen bencana dapat diartikan sebagai keseleruhan proses perencanaan dan intervensi untuk melindungi kehidupan dari bahaya sekaligus sebagai tindakan tanggap darurat dan pemulihan. Empat fase umumnya mewakili manajemen bencana: Mitigasi, Kesiapsiagaan, Respon dan Pemulihan. Empat fase ini sering digambarkan sebagai bagian dari proses berkelanjutan, yaitu :

1. Pencegahan

Pencegahan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah fenomena atau potensi bahaya karena memiliki efek berbahaya pada kehidupan atau aset ekonomi. Tindakan dalam segmen ini dirancang untuk menghalangi terjadinya bencana. Dalam Perencanaan pencegahan didasarkan pada dua hal: identifikasi bahaya (mengidentifikasi ancaman aktual yang dihadapi komunitas) dan penilaian kerentanan (mengevaluasi risiko dan kapasitas komunitas untuk menangani konsekuensi dari bencana). Setelah masalah-masalah ini diatur dalam

prioritas, maka dapat menentukan strategi pencegahan yang tepat. Pencegahan bencana mengacu pada tindakan yang diambil untuk menghilangkan akar-akar penyebab kerentan terhadap bencana.

2. Mitigasi

Tindakan dalam segmen ini biasanya berbentuk program tertentu yang bertujuan untuk meminimalisir dampak bencana. Mitigasi termasuk mengakui bahwa bencana akan terjadi; upaya adalah dibuat untuk mengurangi efek berbahaya dari suatu bencana, dan untuk membatasi dampak pada penderitaan manusia dan aset ekonomi. Program yang umumnya dianggap sebagai tindakan mitigasi seperti peraturan keselamatan yang berkaitan dengan bangunan tinggi.

3. Kesiapsiagaan

Merupakan langkah-langkah yang menjamin terorganisir mobilisasi personel, dana, peralatan, dan persediaan dalam lingkungan yang aman untuk pertolongan yang efektif. Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan membangun kapasitas sebelum situasi bencana untuk mengurangi dampak. Tindakannya meliputi antara lain ketersediaan cadangan pangan, dana cadangan darurat, fasilitas kesehatan, sistem peringatan, infrastruktur logistik.

4. Respon

Tindakan respons biasanya dilakukan dengan segera setelah dampak bencana. Tindakan tersebut terutama ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi properti, dan untuk menangani gangguan langsung, kerusakan, dan efek lainnya disebabkan oleh bencana. Tindakan umum meliputi, melaksanakan

rencana, penyelamatan, menyediakan makanan darurat, tempat tinggal, bantuan medis, evakuasi. Tindakan respon berlaku untuk periode yang cukup singkat yaitu 2-3 minggu setelah dampak bencana.

5. Pemulihan

Pemulihan adalah proses membantu masyarakat terdampak untuk kembali ke keadaan normal. Proses pemulihan membutuhkan waktu yakni yang lama yakni mencapai 5–10 tahun bahkan lebih. Kategori dalam pemulihan yakni :

- a. Periode Restorasi, periode di mana layanan utama, komunikasi dan transportasi dipulihkan. Periode ini bisa memakan waktu dari beberapa minggu hingga beberapa bulan.
- b. Rehabilitasi, adalah pemulihan fungsi sosial dasar pada daerah pasca bencana dan target utamanya untuk normalisasi semua aspek dalam kehidupan masyarakat.
- c. Rekonstruksi adalah pemulihan lingkungan ke tingkat sebelum bencana dan kegiatan sosial dan ekonomi dikembalikan ke tingkat sebelum bencana atau lebih aman dari sebelum bencana.

1.6.2 Pemulihan Hunian Pasca Bencana

Pemulihan hunian sebagai proses panjang yang menawarkan kesempatan untuk membangun kembali bangunan dan Infrastruktur ke kondisi "normal" sebelum bencana melanda. Pemulihan hunian menjadi penting dilakukan mengingat hunian memainkan peran penting dalam mewujudkan stabilitas kehidupan masyarakat (Lindell). Jika hunian rusak karena bencana, orang seringkali terpaksa tinggal di tempat penampungan untuk waktu yang lama dan

akibatnya seringkali, mereka tidak dapat sepenuhnya menjaga kualitas hidup. Saat sebuah komunitas dalam proses pemulihan hunian, terdapat beberapa langkah-langkah yang dirancang. Misalnya, menentukan biaya, kualitas, kecepatan, aksesibilitas, kepuasan penduduk, dan keselamatan penduduk di masa mendatang.

Proses pemulihan hunian dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Karya (Quarantelli, 1982) dalam (Sutley, 2017) menawarkan empat tahap :

- a. Tipe pertama, penampungan darurat, terdiri dari lokasi yang tidak direncanakan dan dicari secara spontan biasanya di halaman terbuka, dimaksudkan hanya untuk memberikan perlindungan setelah gempa bumi.
- b. Jenis kedua bersifat penampungan sementara, yang meliputi fasilitas yang biasanya dicari dari teman dan kerabat atau ditemukan di penginapan komersial.
- c. Jenis ketiga bersifat hunian sementara, yang memungkinkan para korban untuk membangun kembali perumahan di lokasi atau bangunan yang tidak sesuai dengan keinginan.
- d. Jenis keempat adalah hunian permanen atau tetap, yang membangun kembali hunian di lokasi dan struktur yang diinginkan.

Sedangkan Abulnour membagi tempat tinggal pasca bencana menjadi tiga kategori, yakni :

- a. Tempat Penampungan Darurat.

Tempat penampungan darurat digunakan untuk menginkubasi masyarakat segera setelah bencana. Penampungan darurat menggunakan tempat berlindung

yang dapat dibuat dengan cepat seperti tenda maupun bangunan seperti sekolah, masjid, tempat penampungan umum dan sebagainya. Biasanya, masyarakat terdampak tinggal di tempat penampungan darurat selama sehari-hari atau idealnya tidak lebih dari beberapa minggu setelah bencana. Masyarakat yang tinggal di tempat penampungan lebih cenderung untuk tinggal sepanjang hari, kecuali untuk pekerjaan, sekolah atau tugas. Masyarakat terdampak bencana dilindungi di tempat penampungan tetapi tidak dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari, dan karenanya tidak praktis untuk tinggal lebih lama di dalamnya. Demikian juga, tempat penampungan darurat bisa cepat rusak karena faktor eksternal.

b. Hunian Sementara

Hunian sementara adalah tempat yang bisa ditempati oleh masyarakat terdampak bencana untuk jangka waktu yang lebih lama sambil menunggu agar aman untuk kembali ke tempat tinggal permanen. Rumah sementara dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama (bahkan bertahun-tahun) dibandingkan dengan tempat penampungan darurat. Namun biasanya direncanakan selama enam bulan sampai tiga tahun dan masyarakat akan kembali ke hari normal mereka. Secara umum, pembangunan rumah sementara membutuhkan waktu yang cepat sehingga menggunakan material yang tersedia ditempat. Metode penting lainnya adalah penggunaan komponen bangunan perakitan sederhana dan dengan demikian membutuhkan waktu singkat untuk merakit. Partisipasi masyarakat dalam proses konstruksi juga diperlukan untuk menghemat waktu dalam penyediaan tempat tinggal sementara.

Sejak pemulihan hunian dapat berlangsung cukup lama, ada kesenjangan waktu yang perlu dijabatani, dan hunian sementara menjadi pilihan yang tepat. Tempat tinggal sementara dapat menawarkan tingkat kenyamanan bagi masyarakat dengan standar hidup umum (Johnson, 2007). Apalagi hunian sementara memungkinkan masyarakat untuk kembali ke aktivitas normal sehari-hari, seperti bekerja, sekolah, bersosialisasi dll. Hunian sementara juga penting untuk mempromosikan keberhasilan rekonstruksi secara keseluruhan, karena memberikan waktu yang cukup untuk perencanaan konstruksi yang tepat untuk mengurangi risiko masa depan (Johnson, 2008).

c. Hunian Permanen atau tetap

Hunian Permanen yakni kembali ke rumah yang dibangun kembali untuk tinggal secara permanen. Hunian permanen mungkin merupakan rumah yang selamat dari bencana (atau renovasi untuk mengatasi dampak bencana) atau solusi hunian yang benar-benar baru dibangun. Dalam pembangunan hunian pasca gempa bumi penting untuk memasukkan strategi mitigasi kedalam pemulihan hunian melalui kode bangunan, peraturan zonasi, perencanaan penggunaan lahan, dan kebijakan pembangunan. Hal ini yang diimplementasikan dalam pemulihan hunian warga terdampak bencana gempa bumi di Tanjung, Lombok Utara. Pemerintah memberikan pilihan dan menyediakan berbagai jenis Rumah Tahan Gempa (RTG) untuk rekonstruksi hunian terdampak.

Jenis-jenis Rumah Tahan Gempa yang disediakan oleh pemerintah pasca gempa yakni :

- a. Rumah Instan sederhana Sehat (RISHA), merupakan jenis rumah yang bisa dibongkar pasang atau *knockdown* dan merupakan prefabrikasi yang diproses di pabrik dan diisntal di lapangan. Proses pembangunan RISHA yakni dengan sistem penggabungan panel-panel beton dengan baut karena bahan bangunan utama RISHA yakni struktur beton. Ketahanan konstruksi bangunan RISHA terhadap gempa bumi telah diuji di laboratorium Struktur dan Konstruksi Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (Puslitbangkim) dan dinyatakan aman terhadap gempa bumi.
- b. Rumah Instan Kayu (RIKA), dalam proses pembangunannya menggunakan bahan utama kayu dan menggunakan sistem *Laminated Veneer Lumber* atau LVL. Tujuannya untuk menghindari kayu dari kelapukan sehingga memiliki kekuatan.
- c. Rumah instan Baja (RISBA), menggunakan material baja, berdasarkan perhitungan dengan pemodelan komputer perumahan RISBA mampu bertahan ketika terjadi beban gempa
- d. Rumah Konvensional (RIKO) dalam proses pembuatannya menggunakan ikatan bata.

Pemulihan hunian masyarakat diberikan dengan skema pemberdayaan masyarakat. Ada semakin banyak pengetahuan yang berkembang tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemulihan perumahan pascabencana. Partisipasi masyarakat dalam program pemulihan perumahan di mana rumah tangga diberi pilihan untuk membangun kembali perumahan mereka sendiri sesuai keinginan. Masyarakat diberikan kendali penuh dan kewenangan

pengambilan mengenai pilihan bahan bangunan, proses konstruksi, dan desain rumah sesuai kode bangunan yang aman.

1.6.3 Tata kelola Kolaboratif

Meningkatnya frekuensi kejadian bencana belakangan ini telah menimbulkan tuntutan perbaikan rekonstruksi pascabencana dan upaya pemulihan. Sifat kompleks dari Perencanaan dan upaya pemulihan membutuhkan kolaborasi pra-bencana dan pasca bencana antar pemangku kepentingan. Tata kelola kolaboratif sedang digunakan dan diterapkan untuk mengelola dampak bencana yang melampaui kemampuan lembaga untuk mengatasinya. Tata kelola kolaboratif secara luas didefinisikan sebagai proses yang melibatkan aktor negara dan non-negara yang secara bersama-sama menangani suatu masalah, baik itu masyarakat sipil, organisasi publik atau swasta, atau warga negara individu.

Ada berbagai definisi mengenai tata kelola kolaboratif. Anshell dan Gash mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai "Pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, konsensus, dan musyawarah dan yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik." (Ansell & Gash, 2007).

Tata kelola kolaboratif Anshell dan Gash menggunakan istilah berorientasi pada konsensus karena forum kolaboratif seringkali tidak berhasil mencapai konsensus atau kesepakatan. Namun, premis pertemuan bersama di forum

musyawarah, multilateral, dan formal adalah untuk berjuang menuju konsensus atau, setidaknya, untuk berjuang menemukan area kesepakatan.

Ansell dan Gash (2008) memberikan enam kriteria untuk mengidentifikasi tata kelola kolaboratif yang berguna dalam membantu membedakannya dari pendekatan lain yakni :

- a. Prosesnya diprakarsai oleh badan atau lembaga publik
- b. Termasuk partisipasi aktor non-negara
- c. Peserta tidak hanya diajak berkonsultasi - mereka memiliki kekuatan pengambilan keputusan
- d. Diselenggarakan secara formal
- e. Pengambilan keputusan berorientasi pada konsensus

(Agranoff, 2006) menekankan kolaborasi sebagai pengambilan keputusan bersama dan adanya tujuan bersama. Emerson dan Nabatchi telah mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai proses pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang-orang di seluruh batas badan publik, tingkat pemerintahan atau publik, swasta, dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain.

Tata kelola kolaboratif dicari ketika pengelolaan suatu sektor membutuhkan lebih banyak kekuatan teknis, analitis atau keuangan daripada yang dimiliki oleh satu pihak.

Tujuan dari pendekatan tata kelola kolaboratif yaitu :

- a. Memecahkan suatu permasalahan
- b. Menciptakan sesuatu
- c. Tata kelola kolaboratif mampu menjadikan birokrasi berkinerja lebih baik

Institusi yang menjalankan tata kelola kolaboratif mendapat beberapa keuntungan yaitu :

- a. Memiliki kekuatan yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan lebih besar pula dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks
- b. Dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi dikarenakan adanya pertukaran informasi dan pengetahuan.
- c. Mendorong upaya keberlanjutan pemecahan masalah secara bersama-sama

Mekanisme Tata Kelola Kolaboratif yakni :

- a. Desain Sistem

Legitimasi tata kelola kolaboratif mencakup hukum dan proses hukum, yang merupakan persyaratan tak terelakkan dari konstruksi negara hukum modern. Aturan dan hukum harus diintegrasikan ke semua pemangku kepentingan sebanyak mungkin dalam proses tata kelola kolaboratif untuk mengurangi konflik mekanisme yang tidak perlu.

- b. Normatif

Normatif dari tata kelola kolaboratif penting untuk mengembangkan kode etik dan norma yang jelas, spesifik dan operasional, untuk memastikan partisipasi

yang jelas dalam peran dan tanggung jawab semua pihak, yang akan memberikan perlindungan untuk mencapai sistem tata kelola kolaboratif.

c. Menetapkan Agenda

Agenda tata kelola kolaboratif terutama mendefinisikan masalah, tujuan dan berkoordinasi untuk memperoleh solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

d. Mencapai konsensus

Ada dua elemen penting sebelum melakukan tindakan kolaborasi yakni komunikasi dan kepercayaan. Komunikasi dapat meningkatkan antusiasme untuk berpartisipasi, untuk meningkatkan pemahaman dan kreativitas. Kepercayaan bisa jadi dilihat sebagai ketergantungan atau semacam modal dalam upaya tata kelola koaboratif. Pembentukan kepercayaan bukan hanya ditahap awal namun sering diperkuat secara bertahap seiring berjalannya waktu. Kepercayaan adalah “penstabil” dalam tata kelola kolaboratif yang membantu mengurangi risiko kegagalan dan mengurangi biaya transaksi.

e. Implementasi tindakan

Pada tahap implementasi kebijakan, untuk memberikan kekuatan dalam tata kelola dan untuk memastikan efisiensi dan kualitas implementasi penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya yaitu sumber daya manusia, finansial dan material.

f. Hasil

Dalam proses tata kelola kolaboratif, hasil pada akhirnya akan disajikan dalam dua keadaan: satu adalah untuk memecahkan masalah, mencapai tujuan atau kedua tidak memecahkan masalah dan hanya menyelesaikan beberapa masalah.

1.6.4 Collaborative Governance Regime (CGR)

Bagian terpenting dari kerangka kerja *Collaborative Governance Regime* yakni Dinamika Kolaborasi 1) Keterlibatan melalui komunikasi 2) motivasi bersama 3) kapasitas melakukan tindakan bersama. Komponen ini akan membentuk langkah-langkah kolaboratif dalam implementasi tujuan dari *Collaborative Governance*. Langkah-langkah yang diambil dalam kolaborasi kemudian akan menghasilkan dampak yang terlihat di lapangan.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai *Collaborative Governance Regime*

1. Dinamika Kolaborasi

Stakeholders yang terlibat yang terdiri dari lintas organisasi, melakukan pertemuan dan berkomunikasi dalam forum yang telah ditentukan. Komunikasi merupakan cara yang dilakukan oleh stakeholders untuk mencapai keterlibatan dan menggerakkan prinsip bersama karena komponen “berprinsip” dapat dicapai melalui komunikasi dan dialog intensif antar stakeholders. Setelah melalui proses ini stakeholders akan menumbuhkan rasa memiliki tujuan bersama dan menentukan tahapan-tahapan tata kelola kolaboratif.

2. Motivasi bersama

Emerson mengungkapkan bahwa motivasi bersama merupakan siklus memperkuat diri. Emerson membatasi siklus ini menjadi elemen penting yakni saling percaya, komitmen dan pemahaman bersama.

a. Saling percaya

Menurut Brown dalam Emerson elemen saling percaya mengacu pada upaya mengenal stakeholders satu sama lain dan menunjukkan bahwa tiap-tiap stakeholders dapat diandalkan (Emerson, 2011). Elemen saling percaya termasuk elemen penting dalam kolaborasi dikarenakan sebagai salah satu faktor kesuksesan dalam kolaborasi

b. Pemahaman bersama

Antar stakeholders saling memahami dan menghargai perbedaan. Pemahaman bersama mengacu pada kualitas hubungan yang dimiliki sehingga biasanya dipengaruhi oleh proses sebelumnya yakni kepercayaan antar stakeholders.

c. Komitmen

Merupakan upaya yang dimiliki yang dapat menekan hambatan selama proses kolaborasi. Jika stakeholders memiliki komitmen yang kuat maka perbedaan dalam kolaborasi dapat didiskusikan sehingga dapat mencapai tujuan kolaborasi.

3. Kapasitas Aksi Bersama

Kolaborasi bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan kapasitas. Kapasitas melakukan tindakan bersama terdiri dari penyebaran Informasi/pengetahuan dan sumber daya.

a. Informasi

Berbagi informasi dalam kapasitas aksi bersama mengacu pada data informasi dan pengetahuan bersama selama proses kolaborasi. Berbagi informasi dan pengetahuan dalam kolaborasi sangat diperlukan karena stakeholders membutuhkan data dan informasi untuk memahami proses kolaborasi.

b. Sumber daya

Salah satu manfaat yang diperoleh dari kolaborasi adalah memanfaatkan dan berbagi sumber daya yang tidak dimiliki. Sumber daya bisa berupa anggaran, manusia/skill, logistik dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan.

4. Tindakan kolaboratif

Tindakan kolaboratif harus menjadi inti dalam kerangka kerja tata kelola kolaboratif. Dalam hal ini dinamika kolaborasi akan mengarahkan *Collaborative Governance Regime* untuk mengambil tindakan kolaboratif yang dilakukan bersama-sama oleh semua mitra dan tindakan tersebut akan memiliki hasil di berbagai bidang.

5. Dampak Kolaborasi

Dampak merupakan hasil akhir yang didorong karena adanya tindakan kolaboratif, dapat berupa fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan atau politik dan dapat berupa jangka pendek atau dampak jangka panjang.

1.6.5 Stakeholders

Stakeholders menurut (Gazley, 2010) menawarkan cara untuk memeriksa hubungan antara kinerja, keragaman dan keterwakilan yang menggabungkan beberapa pihak. Menurut Biset pihak-pihak yang tergabung yakni yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama pada permasalahan tertentu. Definisi yang diberikan oleh Freeman yakni stakeholders sebagai kelompok atau individu yang dapat diidentifikasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Lebih lanjut Stakeholders dapat dirujuk ke seseorang atau individu yang memberikan kontribusi untuk pengambilan keputusan dan pada saat yang sama, mendapat manfaat dari hasil pembuatan keputusan (Phillips et al., 2003).

(Maryono, 2005) dalam (Handayani & Warsono) membagi stakeholders menjadi 3 kelompok, yakni :

1. Stakeholders Primer, merupakan mereka yang memiliki dan berkepentingan langsung dalam hasil yang dicapai. Stakeholders yang memiliki kepentingan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.
2. Stakeholders kunci, merupakan mereka yang memiliki kekuasaan, otoritas, tanggung jawab dalam pengambilan keputusan.
3. Stakeholders sekunder atau pendukung merupakan mereka yang tidak berkepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual yakni suatu uraian yang memaparkan permasalahan atau sebuah gambaran mengenai pengertian antara dari konsep satu dengan konsep yang lain. Dalam penelitian ini fokus penelitian yakni Pendekatan Tata Kelola Kolaboratif Dalam Pemulihan Hunian Pasca Bencana Gempa bumi Tahun 2018 di Dusun Orong Nagasari, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Maka definisi konseptual dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1.7.1 Manajemen bencana

Manajemen bencana merupakan keseluruhan proses perencanaan dan intervensi untuk melindungi kehidupan dari bahaya sekaligus sebagai tindakan tanggap darurat dan pemulihan.

1.7.2 Pemulihan hunian pasca bencana

Pemulihan hunian sebagai proses panjang yang menawarkan kesempatan untuk membangun kembali bangunan dan Infrastruktur ke kondisi "normal" sebelum bencana melanda.

1.7.3 Tata kelola kolaboratif

Tata kelola kolaboratif secara luas didefinisikan sebagai proses yang melibatkan aktor negara dan non-negara yang secara bersama-sama menangani suatu masalah, baik itu masyarakat sipil, organisasi publik atau swasta, atau warga negara individu. Dalam Tata Kelola Kolaboratif Pemulihan Hunian Pasca Bencana Gempa bumi Tahun 2018 di Dusun Orong Nagasari, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, penulis menggunakan teori *Collaborative Governance* (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2011) yang terdiri dari:

1. Dinamika Kolaborasi, stakeholders yang terlibat yang terdiri dari lintas organisasi melakukan interaksi untuk membangun makna, tujuan bersama dan harapan satu sama lain.
2. Motivasi bersama yakni sebagai siklus memperkuat diri dan sebagai modal dalam kolaborasi.
3. Kapasitas untuk aksi bersama merupakan kombinasi elemen-elemen yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kolaborasi.
4. Tindakan kolaboratif, merupakan inti dalam kerangka kerja tata kelola kolaboratif yang dilakukan bersama-sama oleh semua mitra dan tindakan tersebut akan memiliki hasil di berbagai bidang.
5. Dampak kolaboratif, merupakan "hasil dilapangan" atau hasil yang diperoleh dari tindakan kolaboratif.

1.7.4 Stakeholders

Stakeholders merupakan pihak-pihak yang bergabung yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama pada permasalahan tertentu. Dalam tata kelola kolaboratif pemulihan hunian pasca bencana di dusun Orong Nagasari, stakeholders yang terlibat yakni Bappeda Lombok Utara, BPBD Lombok Utara, PUPR, Kepala desa Sokong, Kepala dusun Orong Nagasari, Arkom dan masyarakat terdampak.

1.8 Definisi Operasional

Definisi Operasional yakni indikator-indikator dalam mengukur variable penelitian yang diturunkan dari kerangka teori. Menurut Sudaryono, definisi operasional dapat didefinisikan sebagai petunjuk dalam mempermudah peneliti menentukan sebuah variable dan indikator yang akan diuji secara empiris

(Sudaryono, 2017). Sehingga dalam penelitian ini akan memaparkan indikator tentang *Collaborative Governance Regime* dalam pemulihan hunian pasca bencana gempa bumi Tahun 2018 di Orong Nagasari. Adapun indikator-indikator mengenai *Collaborative Governnace Regime* yakni sebagai berikut :

Tabel 1.2 Indikator *Collaborative Governnace Regime*

Variable	Indikator
Dinamika Kolaborasi	1. Komunikasi antar stakeholders yakni pemerintah, LSM dan masyarakat dalam pemulihan hunian pasca bencana
Motivasi bersama	1. Kepercayaan antar stakeholders yakni Pemerintah, LSM, masyarakat dalam pemulihan hunian pasca bencana 2. Pemahaman bersama antar stakeholders yakni Pemerintah, LSM, masyarakat terhadap kegiatan pemulihan 3. Komitmen antar stakeholders yakni Pemerintah, LSM, masyarakat dalam pemulihan hunian pasca bencana
Kapasitas melakukan tindakan bersama	1. Identifikasi sumber daya antar stakeholders yakni Pemerintah, LSM, masyarakat untuk pemulihan hunian 2. Penyebaran informasi dan pengetahuan

	selama tahapan pemulihan
Tindakan kolaboratif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi pemulihan hunian 2. Pemantauan implementasi pemulihan hunian
Dampak kolaborasi	<p>Perubahan kondisi hunian masyarakat dari hunian sementara menjadi hunian tetap diukur melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya hunian sesuai standar teknis rumah tahan gempa (RTG) 2. Hunian yang dibangun memenuhi target yang telah ditentukan

Sumber Data: Data Olahan Peneliti

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari pelaku yang akan diamati (Creswell, 2016). Metode kualitatif memberikan ruang kepada peneliti untuk menginvestigasi kasus secara mendalam dan lebih detail. Kasus yang diteliti biasanya peristiwa, aktivitas, program, atau proses yang melibatkan individu atau kelompok (Creswell, 2018). Unit analisa objek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam dalam penelitian ini berlokasi di Dusun Orong Nagasari, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara mengenai tata kelola kolaboratif pemulihan hunian pasca bencana gempa bumi tahun 2018.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Orong Nagasari dengan persoalan utama yang akan diteliti yakni mengenai Tata Kelola Kolaboratif dalam pemulihan hunian. Lokasi ini ditentukan dengan metode *purposive* sampling. Menurut (Sugiyono, 2015) *purposive* merupakan teknik menentukan lokasi penelitian secara sengaja berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Peneliti memilih Dusun Orong Nagasari atas pertimbangan (1) Orong Nagasari salah satu yang mengalami kerusakan parah akibat bencana (2) terdapat pola interaksi antar stakeholders yakni pemerintah daerah, organisasi non pemerintah dan masyarakat setempat dalam membangun hunian di wilayah ini.

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian menggunakan *Purposive Sampling*. (Sugiyono, 2015) menjelaskan *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel data berdasarkan atas pertimbangan kriteria tertentu yang dianggap bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik *Purposive sampling* juga menjelaskan narasumber yang dipilih, dimana pemilihan narasumber berdasarkan ciri-ciri tertentu yakni pihak-pihak yang mengetahui dan yang berhubungan dengan Tata Kelola Kolaboratif dalam pemulihan hunian di Dusun Orong Nagasari. Adapun narasumber dalam penelitian terdiri dari Kepala Bappeda Lombok Utara, Kepala Pelaksana BPBD, kepala PUPR, Kepala Desa Sokong, Kepala Dusun Orong Nagasari, anggota Yayasan Arkom dan masyarakat setempat.

1.9.4 Jenis data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono dalam Purwanto (2018) mengatakan data primer diperoleh dari sumber asli atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini dan mampu memberikan berbagai informasi. Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan wawancara melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada sumber yang mengetahui pokok permasalahan mengenai tata kelola kolaboratif pemulihan hunian di Orong Nagasari. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

Table 1.3 Narasumber

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1. Kepala Bappeda Lombok Utara 2. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara 3. Kepala PUPR Lombok Utara 4. Kepala Desa Sokong 5. Kepala Dusun Orong nagasari 6. Yayasan Arkom 7. Masyarakat	Wawancara

Sumber: Data Olahan Peneliti

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang dikumpulkan sebagai penunjang data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara studi keperpustakaan dari berbagai media seperti buku, dokumen, artikel, jurnal, undang-undang, maupun peraturan-

peraturan yang masih relevan dengan penelitian (Arikunto, 2010). Pada penelitian ini peneliti akan memperoleh data sekunder melalui :

Tabel 1.4 Data Sekunder

No	Sumber Data Sekunder
1	Dokumen/data/tulisan pemerintah mengenai rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi
2	Dokumentasi pemulihan yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan di Dusun Orong Nagasari
3	Jurnal tentang pemulihan perumahan pasca bencana
4	Jurnal tentang <i>Collaborative Governance</i>

Sumber: Data Olahan Peneliti

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data valid dan relevan, digunakan teknik antara lain :

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan relevan mengenai penelitian, informan yang dipilih merupakan pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat dalam upaya pemulihan hunian pasca bencana di Orong Nagasari. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu :

Table 1.5 Narasumber

Narasumber	Nama	Hasil yang ingin diperoleh dari	Jumlah

		wawancara	
Kepala Bappeda Lombok Utara	Heryanto, SP	Mengetahui keterlibatan dalam setiap proses pemulihan hunian dan strategi kolaborasi	1
Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara	Muhadi, SH	Mengetahui keterlibatan dalam setiap proses pemulihan dan strategi kolaborasi	1
Kepala PUPR Lombok Utara	Karazil, ST	Mengetahui keterlibatan dalam proses pemulihan	1
Kepala Desa Sokong	Made Suarjana, SP	Mengetahui keterlibatan dalam proses pemulihan	1
Kepala Dusun Orong Nagasari	Narto	Mengetahui keterlibatan dalam proses pemulihan	1
Arkom	PuspitaNingtyas Christoffel Tiven	Mengetahui strategi kolaborasi, mengetahui bagaimana proses pemulihan hunian dilakukan dan hasil pemulihan	2
Masyarakat	Merti Pusti Mira	Mengetahui keterlibatan dalam Pemulihan hunian dan memberi	Dari ke 3 informan peneliti telah

		penilaian terhadap kinerja pada hasil pemulihan	memperoleh informasi yang cukup karena informan kooperatif dalam wawancara
--	--	---	--

Sumber: Data Olahan Peneliti

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumentasi, foto, buku, maupun karya yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini peneliti akan memperoleh data dokumentasi mengenai tata kelola kolaboratif pemulihan hunian pasca bencana gempa bumi di Orong Nagasari, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antar stakeholders dalam Pemulihan Hunian Pasca Gempa Bumi di Dusun Orong Nagasari, Lombok Utara. Peneliti menggunakan pendekatan SNA atau *Social Networking Analysis*. Menurut Valdis Krebs *Social Network Analysis* adalah pemetaan dan pengukuran hubungan antar individu, kelompok, organisasi dan lainnya dalam sebuah perkumpulan (Krebs, 2004).

Sebagai unit analisis dalam penelitian Kolaborasi, terdiri dari empat level yakni individual, kelompok, organisasi dan antar organisasi. Terkait dengan

penelitian tata kelola kolaboratif dalam pemulihan hunian pasca gempa bumi Tahun 2018 di Orong Nagasari, maka unit analisis pada level organisasi. Pada level Organisasi yakni antara lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam pemulihan hunian pasca bencana. Dengan menggunakan SNA maka akan diketahui kedekatan (*closeness*) dan keperantaraan (*betwenness*) antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemulihan hunian pasca bencana Gempa Bumi Tahun 2018 di Dusun Orong Nagasari, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

- a. kedekatan (*closeness*) merupakan cara yang digunakan untuk mengukur kedekatan dalam suatu jaringan yang berfokus terhadap seberapa dekat aktor satu dengan aktor lain. Semakin rendah nilai farness atau jarak akan semakin baik karena memperlihatkan kedekatan hubungan dengan aktor lain.
- b. Data keperantaraan (*betwenness*), memperlihatkan derajat seorang aktor untuk berperan sebagai perantara dari relasi atau hubungan antar aktor. Semakin tinggi nilai keperantaraan, maka semakin penting posisi seorang aktor karena menunjukkan adanya kepemilikan power untuk melakukan pertukaran informasi